





MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN
DPRD KOTA YOGYAKARTA

DPRD KOTA YOGYAKARTA PERTAHANKAN PROPEMPERDA 2023
Gerak Cepat Tindaklanjuti Hasil Rekomendasi



Tim Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta melakukan finalisasi.
 YOGYA (KR) - Sejumlah rancangan peraturan daerah (rapemda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2023 mendapat pencermatan dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DIY. DPRD Kota Yogyakarta berupaya gerak cepat dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut agar Propemperda 2023 dapat dipertahankan. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Derah (Bapemperda) DPRD Kota Yogyakarta, Tri Waluko Widodo, mengaku terda-

pat empat naskah rapemda yang mendapat catatan dari Kemenkumham DIY. Seluruhnya merupakan inisiatif dari lembaga legislatif. "Total rapemda yang menjadi inisiatif dewan itu ada lima produk. Empat produk di antaranya ada catatan dari Kemenkumham, sehingga ini yang sedang kami kejar betul penyempurnaannya," terangnya. Satu-satunya rapemda inisiatif dewan yang siap untuk dilanjutkan pembahasannya ialah dari Komisi C terkait perubahan perda penanggulangan bencana. Sedangkan empat rapemda yang



Jajaran Komisi D melakukan pembahasan dan penyempurnaan dengan Kemenkumham.
 posisi Propemperda 2023. Diberitakan sebelumnya, Propemperda 2023 yang sudah ditetapkan berisi 14 produk hukum. Tiga produk hukum di antaranya bersifat wajib karena berkaitan penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni menyangkut APBD 2024, APBD Perubahan 2023 dan Pertanggungjawaban APBD 2022. Kemudian lima produk hukum inisiatif dewan, dan sisanya dari eksekutif yakni terkait pengarusutamaan gender, pencabutan perda terkait sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan,



Pansus pembahas rapemda DPRD Kota Yogyakarta melakukan pembahasan.

butuh tindaklanjuti masing-masing dari Komisi A terkait penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, Komisi B terkait perlindungan UKM dan koperasi, Komisi D terkait penyelenggaraan kesejahteraan warga lanjut usia, dan dari Bapemperda terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Catatan tersebut berkaitan dengan draf maupun naskah akademik yang sebelumnya disusun oleh pihak ketiga. Atas catatan itu, Bapemperda langsung melakukan pembahasan internal dilanjutkan koordinasi dengan masing-masing pimpinan komisi maupun pimpinan dewan. Bahkan tanpa perlu menunggu waktu lama, tiap komisi yang berkaitan juga melakukan pembahasan bersama Kemenkumham maupun Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta. "Hasilnya akan kami eksplor bersama pada awal Mei besok, tepatnya Selasa (25)," tandas Tri Waluko Widodo. Dari informasi awal, naskah dari Komisi A sudah dilakukan penyempurnaan bersama Kemenkumham dan dapat dilanjutkan pembahasan. Begitu pula naskah dari Komisi B dan Komisi D yang akan dikordinasikan pekan depan. Harapannya semua sudah berhasil dilakukan penyempurnaan atau penyesuaian sehingga tata kala pembahasan dapat digulirkan. Dengan demikian, Propemperda 2023 bisa bergulir sesuai target awal. Hanya, imbuh Tri Waluko Widodo, naskah dari Propemperda masih terjadi dinamika. Hal ini lantaran tidak hanya pada draf melainkan juga naskah akademik yang perlu dirombak. Pihak ketiga yang melakukan penyusunan se-



Tim eksekutif menjabarkan rancangan produk hukum di DPRD Kota Yogyakarta.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005